

**IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENGUNDURAN DIRI CALON  
PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2024 DALAM TAHAP  
REKRUTMEN**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**MELISA PUTRI PERMATA SARI**

**NIM. 21.01.111.00224**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA  
FAKULTAS HUKUM  
BANGKALAN  
2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENGUNDURAN DIRI CALON  
PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2024 DALAM TAHAP  
REKRUTMEN**

**SKRIPSI**

Oleh:

**MELISA PUTRI PERMATASARI**

**NIM. 21.1111.00224**

**Disetujui untuk Ujian Tugas Akhir  
Bangkalan, 30 September 2025**

**Dosen Pembimbing**

**Prof. Dr. YUDI WIDAGDO WIDAGDO, S.H., M.H**

**NIP.19640703200112100**

**IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENGUNDURAN DIRI  
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2024 DALAM  
TAHAP REKRUTMEN**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**MELISA PUTRI PERMATASARI**

**NIM. 21.1111.00224**

**Skripsi hukum ini telah diuji dan berhasil dipertahankan dihadapan  
Majelis Peguji Tugas Akhir Fakultas Hukum**

**Universitas Trunojoyo Madura, Pada hari Rabu, 05 November 2025**

**MAJELIS PENGUJI  
PENGUJI I (Ketua)**

**Prof. Dr. INDIEN WINARWATI, S.H., M.H.  
NIP. 196201082001122002**

**PENGUJI II**

**PENGUJI III (Pembimbing)**

**HELMY BOEMIYA, S.H., M.H.  
NIP. 198912232018031001**

**Prof. Dr. YUDI WIDAGDO  
HARIMURTI, S.H., M.H.  
NIP. 19640703200112100**

**Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum**

**Dr. ERMA RUSDIANA, S.H., M.H.  
NIP. 196912312001122002**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Melisa Putri Permatasari  
NIM : 210111100224  
Judul Skripsi : Implikasi Hukum Terhadap Pengunduran Diri Calon  
Pegawai Negeri Sipil Tahun 2024 dalam Tahap  
Rekrutmen

Dengan ini saya menyatakan, bahwa skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain, dan di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila suatu saat ada pihak lain yang melakukan klaim bahwa skripsi ini merupakan plagiat karya ilmiah lain, dan dapat dibuktikan, saya bersedia menerima segala sanksi yang akan diberikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

Bangkalan, 14 November 2025



Melisa Putri Permatasari

NIM. 210111100235

## ABSTRAK

Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) merupakan instrumen fundamental dalam mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, berintegritas, dan berdaya guna sebagai pelaksana amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945. Namun dalam beberapa tahun terakhir, tingginya angka pengunduran diri peserta setelah dinyatakan lulus seleksi menimbulkan persoalan yuridis dan administratif yang signifikan. Data Badan Kepegawaian Negara menunjukkan bahwa pada seleksi CPNS tahun 2024 terdapat 1.967 calon yang mengundurkan diri atau sebesar 12,12% dari formasi yang seharusnya terisi. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kekosongan formasi, terutama pada jabatan strategis dan formasi khusus seperti penempatan di daerah 3T, tetapi juga menyebabkan kerugian negara akibat biaya rekrutmen serta terganggunya kualitas pelayanan publik. Meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN mengatur manajemen ASN, belum terdapat pengaturan komprehensif mengenai konsekuensi hukum bagi CPNS yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus. Peraturan Menteri PANRB, termasuk Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2024, hanya memberikan sanksi berupa larangan melamar selama dua tahun tanpa ketentuan pertanggungjawaban finansial, sehingga terjadi kekosongan norma dan ketidakpastian hukum. Ketidadaan mekanisme sanksi yang tegas melemahkan akuntabilitas proses seleksi, menimbulkan inefisiensi anggaran, serta membuka peluang terulangnya fenomena pengunduran diri secara masif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis implikasi hukum pengunduran diri CPNS dan urgensi pembentukan regulasi yang mengatur mekanisme pertanggungjawaban hukum secara proporsional. Rekomendasi yang ditawarkan meliputi penerapan skema sanksi finansial berdasarkan tahapan seleksi yang telah dilalui, penguatan perjanjian administratif sejak awal seleksi, serta harmonisasi kebijakan antarinstansi. Hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum administrasi negara, khususnya dalam memperkuat kepastian hukum, efisiensi anggaran, dan efektivitas manajemen ASN.

Kata Kunci: Pengunduran Diri CPNS, Rekrutmen CPNS, Pertanggungjawaban Hukum

## **ABSTRACT**

*The recruitment of Civil Servant Candidate (CPNS) is a fundamental instrument in realizing a professional, integrity-driven, and effective State Civil Apparatus (ASN) as the implementer of constitutional mandates as regulated in Article 28D Paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, in recent years, the high rate of resignation among participants after passing the selection has raised significant legal and administrative issues. Data from the National Civil Service Agency indicate that in the 2024 CPNS selection, there were 1,967 candidates who resigned, accounting for 12.12% of the positions that should be filled. This condition not only causes vacancies, especially in strategic positions and special formations such as placements in 3T areas, but also results in financial losses to the state due to recruitment costs and disrupts the quality of public services. Although Law Number 20 of 2023 concerning ASN regulates ASN management, there is no comprehensive regulation regarding legal consequences for CPNS who resign after being declared successful. The Ministerial Regulation of PANRB, including Permen PANRB Number 6 of 2024, only provides sanctions in the form of a two-year ban from applying, without provisions on financial accountability, leading to normative gaps and legal uncertainty. The absence of strict sanctions mechanisms weakens the accountability of the selection process, causes budget inefficiencies, and opens opportunities for mass resignation phenomena to recur. This research employs a normative juridical approach to analyze the legal implications of CPNS resignation and the urgency of establishing regulations that regulate proportionate legal accountability mechanisms. The recommended solutions include implementing a financial sanctions scheme based on the stages of the selection process passed, strengthening administrative agreements from the beginning of the selection, and harmonizing policies across agencies. It is hoped that this research will contribute to the development of administrative law science, particularly in strengthening legal certainty, budget efficiency, and the effectiveness of ASN management.*

*Keywords: CPNS Resignation, CPNS Recruitment, Legal Responsibility*

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat dan hidayah dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Implikasi Hukum Terhadap Pengunduran Diri Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2024 dalam Tahap Rekrutmen”. Adapun tujuan penulisan skripsi ini Adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1), Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Penulis menyadari bahwa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak mulai dari masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini, sangat membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Trunojoyo Madura Prof. Dr. Safi, S.H., M.H atas berbagai sarana fasilitas yang telah diberikan kepada penulis selama mengikuti seluruh kegiatan perkuliahan dan juga atas kesempatan yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Trunojoyo Madura.
2. Dr. Erma Rusdiana S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
3. Dr. Apriliana Pawestri selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
4. Prof. Dr. Yudi Widagdo Harimurti S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan banyak waktu, tenaga serta pikiran untuk memberikan arahan, bimbingan serta motivasi kepada penulis dalam

menyusun skripsi ini. Semangat dan Kesabaran yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum dan yang selama ini telah memberi banyak ilmu pengetahuan dan wawasan yang tak ternilai harganya selama penulis menempuh pendidikan Program Studi Ilmu Hukum.
6. Terkhusus kepada kedua Orang Tua Tercinta Bapak Nurkayat dan Ibu Mujiah, yang tidak pernah berhenti memberikan doa, dukungan moril dan materiil, serta kasih sayang tiada henti. Serta Kakak tersayang Sundari dan Sholihin yang selalu memberi motivasi dan Keponakan tercinta Binti Ainur Rohmatus Sholihin dan Vaila Imroatus Maqfirotus Sholihin yang selalu menjadi penghibur
7. Sahabat Sahabat penulis Nurul Rapita Sari, Meta Anisa Eva, Siti Muthoharoh, Nita Anggraeni, Ica Yuanita Irfani, Fathul Ardiansyah, Dani Rizal Romadhon yang telah menemani suka duka dalam masa perkuliahan dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dari segi materi maupun tata Bahasa. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan di masa mendatang.

Bangkalan 05, November 2025

Penulis



Melisa Putri Permatasar

## DAFTAR ISI

|                                                                                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>                                                  | <b>ii</b>        |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>                                                    | <b>iii</b>       |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>                                                   | <b>iv</b>        |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                              | <b>v</b>         |
| <b><i>ABSTRACT</i>.....</b>                                                       | <b><i>vi</i></b> |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                        | <b>vii</b>       |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                            | <b>ix</b>        |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                                         | <b>xi</b>        |
| <br>                                                                              |                  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                     | <b>1</b>         |
| <b>1.1 Latar Belakang Masalah.....</b>                                            | <b>1</b>         |
| <b>1.2 Rumusan Masalah.....</b>                                                   | <b>7</b>         |
| <b>1.3 Tujuan dan Kegunaan.....</b>                                               | <b>8</b>         |
| <b>1.4 Keaslian Penelitian .....</b>                                              | <b>10</b>        |
| <b>1.5 Metode Penelitian .....</b>                                                | <b>11</b>        |
| 1.5.1 Jenis Penelitian .....                                                      | 11               |
| 1.5.2 Pendekatan Penelitian.....                                                  | 12               |
| 1.5.3 Sumber Bahan Hukum .....                                                    | 13               |
| 1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....                                         | 14               |
| 1.5.4 Analisis Bahan Hukum.....                                                   | 16               |
| <br>                                                                              |                  |
| <b>BAB II REKRUTMEN DAN PENGUNDURAN DIRI CALON PEGAWAI<br/>NEGERI SIPIL .....</b> | <b>17</b>        |
| 2.1 Hukum Kepegawaian .....                                                       | 17               |
| 2.1.1 Pengertian Hukum Kepegawaian .....                                          | 17               |
| 2.1.2 Pengertian Pegawai Negeri Sipil.....                                        | 18               |
| 2.2 Calon Pegawai Negeri Sipil .....                                              | 19               |
| 2.2.1 Pengertian Calon Pegawai Negeri Sipil .....                                 | 19               |
| 2.2.2 Pengaturan Calon Pegawai Negeri Sipil .....                                 | 21               |

|       |                                           |    |
|-------|-------------------------------------------|----|
| 2.2.3 | Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil..... | 22 |
| 2.2.4 | Pengunduran Diri CPNS .....               | 23 |
| 2.3   | Hukum Administrasi.....                   | 24 |
| 2.3.1 | Pengertian Hukum Administrasi .....       | 24 |
| 2.3.2 | Pengertian Sanksi Administratif.....      | 25 |
| 2.4   | Teori Peraturan Perundang Undangan.....   | 26 |
| 2.5   | Teori Pertanggungjawaban .....            | 27 |
| 2.6   | Asas Legalitas.....                       | 28 |
| 2.7   | Asas Kepastian Hukum .....                | 29 |

**BAB III PENGATURAN KEKOSONGAN FORMASI CALON PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DAN PERTANGGUNGJAWABAN AKIBAT PENGUNDURAN  
DIRI..... 31**

|     |                                                                                                                                          |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1 | Pengaturan Kekosongan Formasi Akibat Pengunduran Diri Calon Pegawai<br>Negeri Sipil .....                                                | 31 |
| 3.2 | Pertanggungjawaban Calon Pegawai Negeri Sipil yang Mengundurkan<br>Diri Dapat Diwujudkan dalam Bentuk Pertanggungjawaban Finansial ..... | 44 |

**BAB IV PENUTUP ..... 57**

|     |                 |    |
|-----|-----------------|----|
| 4.1 | Kesimpulan..... | 57 |
| 4.2 | Saran.....      | 58 |

**DAFTAR PUSTAKA..... 59**

**BIODATA PENULIS..... 64**

**DAFTAR TABEL**

1.Tabel 1 ..... 10

2.Tabel 2 ..... 35

3.Tabel 3 ..... 38

4.Tabel 4..... 46